



# BULETIN PARLEMENTARIA

JANUARI 2017 • NOMOR 944/IV/I/2017

## PASAR SENEN HARUS TETAP JADI PASAR RAKYAT

5 REVISI UU ASN  
FOKUS AKOMODIR  
ASPIRASI HONORER

9 LPP HARUS LEBIH AKTIF  
DALAM PESTA DEMOKRASI





Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon meninjau pasca terbakarnya Pasar Senen di Jakarta Pusat

## Pasar Senen Harus Tetap Jadi Pasar Rakyat

Kebakaran yang terjadi di Blok I dan Blok II di lantai dasar sampai dengan lantai 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon. Disela-sela kesibukannya, Fadli yang didampingi Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dan Fadhlullah, menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi kejadian untuk melihat langsung kondisi bangunan yang terbakar dan berdialog dengan para pedagang dan pemilik kios yang menjadi korban kebakaran.

**D**alam kesempatan dialog itu, Fadli menegaskan bahwa Pasar Senen harus tetap menjadi pasar rakyat, karena itu merupakan salah satu simbol dari ekonomi rakyat.

"Kami sudah mendengar langsung apa yang menjadi harapan dan permintaan dari para pedagang Pasar Senen yang menjadi korban kebakaran pada tanggal 19 Januari

lalu, mereka menginginkan agar relokasi dapat segera dilakukan, yaitu di area tempat parkir yang ada diwilayah sekitar sini," ucap Fadli, di Jakarta, Senin (23/01).

Fadli menjelaskan, hal tersebut dimaksudkan agar para pedagang itu dapat segera berusaha kembali. Para pedagang juga menginginkan agar ada satu penelitian yang cepat terhadap penyebab terjadinya

kebakaran tersebut, dan mengharapkan adanya pemberian bantuan kepada mereka.

"Yang juga sangat penting adalah bagaimana bisa membangun kembali Pasar Senen sebagai pasar rakyat. Banyak para pedagang yang sudah berdagang selama puluhan tahun, jangan sampai terjadi alih fungsi dari pasar menjadi apartemen, mal, atau menjadi suatu bangunan yang harga sewanya mahal dan tidak lagi terjangkau oleh para pedagang," tandasnya.

Menurutnya, modus-modus seperti ini jangan sampai terjadi di Pasar Senen, mereka yang sudah menjadi korban kebakaran, jangan sampai menjadi korban lagi dari usaha untuk menutup mata pencahariannya.

"Kami berharap ada perwakilan pedagang korban kebakaran yang bisa datang ke DPR RI, dan akan kami komunikasikan dengan Komisi yang bersangkutan, agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait dengan Pasar Senen ini bisa kembali berfungsi dengan baik," ujar politisi Gerindra itu. ■

dep/foto:swan ammarasw.



# DPR RI Jalankan Reformasi Kelembagaan Menuju Parlemen Modern

Ketua DPR RI Setya Novanto meresmikan nama Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01). Dalam sambutannya dia memaparkan, saat ini DPR RI secara keseluruhan akan menjalankan program reformasi kelembagaan menuju parlemen yang modern.

“ Apa yang dimaksudkan dengan parlemen modern benar-benar bisa tercipta. Karena itu saya berharap agar semua jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan siap melakukan perubahan menuju DPR yang modern,” papar Novanto.



Pimpinan DPR RI berfoto bersama Pejabat Setjen dan BK DPR RI

Saat acara peresmian nama baru Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, hadir Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah, serta Ketua BURT Agung Budi Santoso. Sedangkan jajaran Sekjen, hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR Achmad Djuned dan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Jhonson Rajagukguk.

Novanto mengatakan, Kesekjen dan Badan Keahlian Dewan memiliki posisi yang sama, walaupun gedungnya lama, tetapi namanya baru. Perubahan nama gedung ini merupakan momen penting dalam perkembangan kelembagaan sistem pendukung DPR RI. Peresmian ini sekaligus menandakan pengakuan terhadap keberadaan Badan Keahlian DPR RI yang baru dibentuk.

"Saya harap BKD dapat meningkatkan kinerja serta mutu pelayanan keahlian untuk mendukung tugas-tugas dewan

legislasi, anggaran, serta pengawasan," ujar Novanto.

Dia juga beranggapan walaupun tugas bidang teknis administrasi dapat dibedakan dengan tugas dukungan substansi, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Jadi ini perlu dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung di antara unit kerja yang terkait.

"Karena pada akhirnya bagaimana membangun DPR RI sebagai lembaga negara yang dipercaya oleh rakyat. Serta dapat menjalankan fungsi dengan baik," harap Novanto.

Dia juga menilai, selama ini Plt Sekjen dan Ketua BKD kompak, dia berharap ke depan keduanya bisa melakukan koordinasi secara baik. Selain itu DPR RI juga akan melakukan penataan kawasan agar kawasan parlemen benar menjadi simbol sejarah peradaban bangsa Indonesia. ■

(e)ey/foto: Akca/hr



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

## PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

## WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website)

## REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

## SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

## ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

## REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

## FOTOGRAFER

Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah

## ADMINISTRASI FOTO

Hasni Mentari

## ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN & DISTRIBUSI

### PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Wijaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

### WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

### STAFF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Mujiono

### SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan,  
Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

## Paripurna Setujui Revisi UU MD3 Menjadi Inisiatif DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III tahun 2016/2017 telah mengesahkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI atau UU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan-pandangannya secara tertulis.



Pimpinan DPR RI

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Fahri Hamzah langsung meminta kesepakatan untuk membawa Revisi UU MD3 sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. "Apakah RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI dapat disetujui?" tanya Fahri di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa (24/01).

"Setuju," jawab seluruh hadirin rapat paripurna.

Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, pembahasan akan dilanjutkan bersama perwakilan dari pemerintah dimana Pimpinan DPR RI akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusan Rapat Paripurna kali ini.

Turut serta dalam rapat kali ini, Ketua DPR RI Setya Novanto serta seluruh jajaran Wakil Ketua DPR RI yakni Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon.

Selain membahas revisi UU MD3, Rapat Paripurna ini juga membahas penetapan kembali sejumlah tim yang dimiliki oleh DPR RI, yaitu Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Implementasi Reformasi DPR RI, Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berikutnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, dan Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan. ■

RejiFoto: Azeq/HR

## DPR RI Dukung Peningkatan Bilateral Indonesia - Republik Ceko



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Ceko. Termasuk hubungan kerjasama antara DPR RI dengan Parlemen Ceko.

“ Kami sangat mendukung peningkatan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Republik Ceko. Tak terkecuali juga hubungan

kerjasama DPR RI dengan Parlemen Ceko. Sebagaimana diketahui Republik Ceko merupakan Negara yang cukup berpengaruh di Eropa timur," ujar Taufik

Kurniawan usai menerima kunjungan Duta besar Republik Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (23/01).

Potensi perdagangan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang bisa meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Ceko. Tidak hanya itu, bidang pertanian dan seni antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Mengingat tidak sedikit seniman khususnya tokoh violins dunia yang terlahir di negeri Praha tersebut.

"Tadi sempat disebutkan bahwa banyak tokoh biola dunia atau violins internasional berasal dari Praha, Ceko. Disini bisa menjadi ajang bagi artis dan pelajar seni Indonesia untuk memperdalam kemampuan seninya di negara tersebut," ungkap Politisi dari Fraksi PAN itu.

Pada kesempatan itu Taufik yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Perindustrian dan pembangunan, Agus Hermanto, Ketua BKSAP, Nurhayati Assegaf serta Anggota

Komisi I DPR RI, Dave Laksono, juga Kepala BKD Jhonson Radjagukguk ini juga mengamini keinginan Ivan Hotek untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan.

Di akhir pertemuan, Ivan juga mengundang DPR RI untuk mengunjungi negaranya pada bulan Februari mendatang. Direncanakan pada bulan Juli, Ketua Parlemen Republik Ceko beserta delegasi akan mengunjungi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai kunjungan balasan. ■

by/Photo: Andri/nr

## Revisi UU ASN Fokus Akomodir Aspirasi Honorer

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon memastikan, revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akan fokus untuk mengakomodir honorer yang menunggu kepastian pekerjaan. Revisi UU ASN telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pada Selasa (24/01) lalu.

Demikian dikatakan Fadli saat menerima kunjungan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendy beserta komisioner, di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01). Dalam kesempatan ini, KASN menyampaikan sejumlah masukan terkait revisi UU ASN.

"Saya kira sebagian besar Anggota Dewan dan Fraksi yang menyetujui revisi UU ASN ini, lebih kepada bagaimana kita mengakomodir aspirasi dari masyarakat, terutama para honorer guru, tenaga harian lepas, para penyuluh pertanian, hingga honorer medis, yang jumlahnya sangat banyak, untuk mendapatkan kepastian terhadap nasib mereka, terutama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," pasti Fadli.

Politisi F-Gerindra itu mendukung soal kepastian kepada para honorer. Mengingat, banyak Anggota Dewan ketika ke daerah pemilihannya, kerap kali masyarakat mempertanyakan masalah itu. Sehingga, permasalahan itu dapat segera dibahas dalam pembahasan teknis di Badan Legislasi dengan Pemerintah.

Terkait dengan wacana pembubaran KASN yang merupakan imbas dari revisi UU ASN, Fadli



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menerima kunjungan KASN

mengatakan jika lembaga ini masih diperlukan, DPR bersama Pemerintah sepakat tentu akan dipertahankan. Namun, jika menjadi redundan (mubazir), mungkin bisa digunakan oleh instansi lain.

"Mereka menyampaikan bagaimana supaya KASN tetap berjalan, ini akan menjadi bahan pembicaraan di Baleg bersama dengan Pemerintah. Tapi saya sampaikan, konsentrasi dari DPR pada umumnya, prioritas pada menampung

saluran aspirasi dari masyarakat honorer yang jumlahnya cukup besar, dari berbagai latar belakang kehidupan profesi," imbuh Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga berharap, ke depannya tak akan ada lagi transaksi jual beli jabatan atau jual beli untuk menjadi pegawai, dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya fokus kepada tuntutan honorer, karena telah menunggu cukup lama. ■

by/Photo: warr/nr

# Penyelundupan Senjata Sudan, DPR RI Tunggu Penyelidikan PBB

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menegaskan pihaknya menunggu hasil penyelidikan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas dugaan adanya penyelundupan senjata ke Sudan. Fadli Zon yakin TNI/Polri tidak terlibat.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto

“ Kita masih menunggu penyelidikan PBB atas senjata ilegal, karena ini melibatkan pasukan perdamaian dan menyangkut reputasi Indonesia. Karena itu, Indonesia harus klarifikasi sesegera mungkin. Bahwa kita memang tidak terlibat. Tetapi kalau terlibat itu harus mendapat sanksi yang berat,” kata Fadli Zon pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (24/01) menanggapi adanya penyelundupan senjata di Sudan.

Untuk itu dirinya berharap nanti PBB bisa menjelaskan soal senjata selundupan tersebut secara resmi. Dan oleh sebab itu, semua pihak menurut Fadli Zon, harus menunggu klarifikasi dari PBB.

Sebelumnya dikabarkan pasukan Formed Police Unit (FPU) VIII dari RI hingga saat ini masih tertahan di transit camp di Bandara Al-Fashir, Sudan. Mereka sedang dalam pemeriksaan dan diinterogasi oleh petugas setempat terkait dengan tuduhan menyelundupkan senjata.

"Mereka itu ada dalam satu transit camp yang ada di dalam bandara, kemudian mereka ada yang diperiksa dan ada yang diinterogasi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Selasa (24/01).

Untuk membantu kepulangan mereka, ada instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera mengirimkan personel ke Sudan. Nantinya personel Polri yang akan dikirim melihat proses pemeriksaan terhadap pasukan FPU VIII dan membantu kepulangan mereka.

"Pak Tito menyampaikan segera mengirim personel ke sana untuk membantu, baik untuk hukum maupun memastikan bahwa mereka tidak bersalah dan kemudian kembali," kata Martinus. ■

inf/Photo: Abadihr

## Ketua DPR RI Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Malaysia



Ketua DPR RI, Setya Novanto didampingi sejumlah Anggota DPR RI menerima kunjungan Dubes Malaysia

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dan Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Malaysia Dato Zahrain Mohammed Hashim, di Ruang Tamu Ketua DPR RI Nusantara III, Jakarta, Rabu (25/01). Dalam pertemuan ini dibicarakan soal 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia.

Selain itu juga membahas tentang perekat hubungan kedua negara dalam hal ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan juga perhatian pada kasus penindasan muslim Rohingya. "Memang hubungan Indonesia dengan Malaysia bisa dibilang keluarga, dan saling dekat," ujar Novanto.

Novanto juga menyinggung soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia agar diperlakukan secara layak. Tentang perdagangan kelapa sawit agar harganya terkendali, hendaknya bisa diatur secara bersama. Isu-isu perbatasan juga dibahas dalam pertemuan ini, permasalahan laut Cina Selatan, dan pulau Natuna juga tidak luput dari perhatian kedua belah pihak.

Sementara itu, terkait masalah Rohingya, Nurhayati Ali Assegaf menekankan, dia mengajak Malaysia untuk ikut berperan aktif mengatasi kasus penindasan muslim Rohingya. Dia mengatakan sudah berkirim surat kepada Sekjen IPU agar Parlemen Myanmar segera mengatasi masalah Rohingya.

Dato Zahrain Mohammed Hashim mengatakan persahabatan kedua negara bagaimana saudara. Dia juga membicarakan bagaimana memperkuat hubungan *people to people*. "Kita telah 60 tahun berkawan, bukan hanya kawan biasa tapi keluarga. Kita akan cari jalan menyelesaikan masalah dan isu-isu kedua negara, supaya kita memperkuat lagi hubungan," paparnya. ■

## Komisi IX DPR RI Bentuk Panja RUU tentang Kepalangmerahan

Indonesia sudah menyetujui Konvensi Jenewa tahun 1949. Namun sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Kepalangmerahan. Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah bertekad untuk merampungkan UU tersebut dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kepalangmerahan.

“ Kita usahakan menampung berbagai masukan dan pandangan dari masyarakat agar UU ini bisa selengkap mungkin mengatur kebutuhan kepalangmerahan kita,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri usai rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01).

Tujuan dari RUU ini, lanjut politis F-PG itu, untuk memberikan landasan hukum bagi upaya kegiatan kemanusiaan yang akan dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dalam kontribusinya menangani bencana dan korban, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan.

"Ini semua akan diatur dalam RUU, agar nantinya UU Kepalangmerahan berjalan sesuai koridor yang baik. Dan agenda kepalangmerahan tidak dimanfaatkan untuk tujuan politik dan lainnya. Kita ingin UU Kepalangmerahan ini benar-benar memanfaatkan prinsip-



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri

prinsip kepalangmerahan secara kemanusiaan tanpa ada penggunaan dari aspek lain," jelas politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso. Politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan Palang Merah Indonesia telah memiliki jasa besar terhadap Bangsa Indonesia, baik dalam pelayanan kesehatan, transfusi dan penyediaan darah, hingga kegiatan tanggap bencana dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

"Untuk itu diperlukan Undang-Undang untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam membantu kegiatan kemanusiaan. RUU Kepalangmerahan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaannya," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

### Palang Merah Indonesia telah memiliki jasa besar terhadap Bangsa Indonesia

# Komisi V DPR RI Tinjau Bendungan Seumayam, Pidie, Aceh

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Seumayam, yang terletak di Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (19/01). Komisi V DPR RI mendapat informasi, bendungan ini kerap kali jebol dihantam banjir.

**K**etua Tim Kunspek, sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia mengatakan, akibat dari jebolnya tanggul ini, berdampak pada terganggunya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Bahkan, salah satu jembatan yang menjadi aliran air dari waduk, ikut jebol. Imbasnya, sumber air untuk lahan pertanian, ikut terganggu.

"Dari sisi kewenangan, ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah pengeluaran dana melalui diskresi menteri, tanpa persetujuan dari Komisi V DPR RI. Untuk itu kita ingin lihat, dana yang dikeluarkan untuk darurat ini, apakah dibutuhkan masyarakat," kata Yudi, usai meninjau bendungan dengan didampingi Plt. Bupati Pidie, Munawar A. Jalil beserta jajaran.

Saat meninjau kondisi bendungan, politisi F-PKS itu mendapat laporan bahwa masyarakat ingin bendungan dibuat lebih permanen, bukan bendungan darurat lagi. Pasalnya, dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat, dikhawatirkan bendungan akan jebol kembali.

"Untuk itu, kami meminta kajian yang komprehensif dari Bappeda, ataupun pihak penanganan oleh pemerintah pusat. Sementara luas cakupan lahan yang ini dibawah 1000 hektar," jelas Yudi. Untuk diketahui, agar bendungan dapat ditangani oleh pemerintah pusat, minimal area pengairan harus di atas 3000 hektar.

Yudi memastikan, pihaknya akan menunggu kajian dari Pemkab Pidie dan Bappeda terkait kondisi bendungan dan waduk, sehingga dapat diketahui apakah

bisa dialokasikan anggaran untuk menjadi bendungan permanen di tahun mendatang.

"Karena kita khawatir kalau sekedar ditutup saja, jebol lagi. Berulang kali kerugiannya. Ini tidak kita inginkan," tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu

Sementara itu, Kepala Bappeda Pidie Muhammad Adam mengatakan, banjir melanda beberapa waktu lalu yang menyebabkan tanggul waduk jebol dan jembatan ambruk. "Jembatan ini sebagai jalur akses kawasan perkebunan warga ambruk dalam bencana banjir beberapa waktu lalu," jelasnya saat peninjauan kondisi bendungan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pidie, Waduk Seumayam memiliki kapasitas 882 Hektar lahan yang tersebar di 10 Gampong dari 64 Gampong dalam Kecamatan Padang Tiji. Pada awal bulan ini, terjadi banjir di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Besar. Dampak banjir paling parah dirasakan di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, yang menyebabkan 73 rumah penduduk terendam banjir.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Daniel Mutaqin Syaifudin (F-PG), Andi Iwan Darmawan Azis (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-PD), Sungkono (F-PAN), dan Sahat Silaban (F-Nasdem). Hadir pula dari perwakilan pemerintah pusat, diantaranya KemenPUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan BMKG. ■

BaliFoto/Sekyanti



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Seumayam di Pidie, Aceh





## PLN Diminta Jalankan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik

Komisi VI DPR RI mendesak para jajaran Direksi PT. PLN Persero agar menyelenggarakan tata kelola perusahaan secara baik dan benar, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran pimpinan dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir.

“ Dalam hal ini Komisi VI DPR RI telah meminta Direksi PT. PLN menerapkan secara benar sistem tata kelola perusahaan yang baik, berupa *good governance*, sebagaimana diatur dalam aturan menteri BUMN Nomor 01 tahun 2011,” papar Hekal di Ruang Sidang Komisi VI, Selasa (24/01)

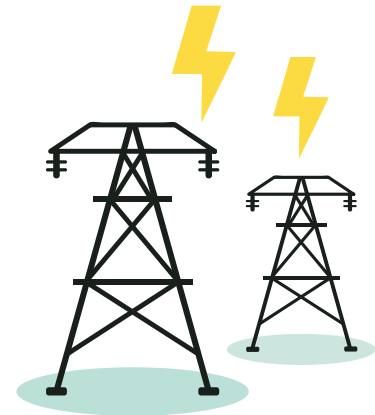


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal

sore.

Rapat Dengar Pendapat tersebut juga membahas kinerja PLN tahun 2016, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengevaluasi sejumlah pelanggan dan operasional dalam PLN. Seperti kinerja operasional dan kinerja keuangan PT. PLN Persero.

“Banyak sekali permasalahan yang muncul terkait kinerja PT. PLN dalam rangka memenuhi



program 35 ribu mega watt yang dicanangkan oleh pemerintah dan terkait penyimpangan serta persekongkolan,” ungkap Hekal.

Komisi VI DPR RI juga meminta penjelasan PLN mengenai dugaan suap Rolls Royce dalam tender proyek pemeliharaan pembangkit listrik Tanjung Batu, Samarinda, Kalimantan Timur.

Berdasarkan laporan *Serious Fraud Office*, sejumlah pejabat PLN menerima uang komisi karena berhasil memenangkan Rolls Royce dalam proyek tersebut. Komisi VI DPR RI juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan alasan PLN menggunakan mesin milik Rolls Royce, hanya untuk pemeliharaan instalasi. ■

foto: mefyFoto: Anka/ht

## LPP Harus Lebih Aktif Dalam Pesta Demokrasi

Anggota Pansus RUU Pemilu Al Muzammil Yusuf melihat pentingnya peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yakni TVRI dan RRI sebagai wadah untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas di tengah maraknya stasiun televisi swasta yang cenderung partisan dalam proses demokrasi. Hal itu diungkapkan saat media visit ke Kantor Redaksi Republika, Jakarta Selatan, pada Senin, (23/01).



Tim Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mengunjungi Mahaka Media

“ Memang LPP TVRI, RRI dan Antara mendapatkan anggaran negara. Oleh karenanya mereka harus terlibat aktif dalam pesta demokrasi. Harus kita sehatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam memberitakan seluruh peserta pemilu,” ujar Al Muzammil.

Untuk meminimalisir adanya media yang cenderung partisan, ia menjelaskan hal itu sedang dalam proses pembahasan di Pansus Pemilu. Oleh karenanya, memperkuat LPP bisa menjadi opsi untuk menyeimbangi media yang cenderung partisan. “Kita ingin hidupkan LPP. Ya di tv swasta mereka bisa bicara tapi tak ada lambang partai yang dibawa,” jelasnya.

la pun juga mendorong media, baik LPP

maupun swasta untuk dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini agar masyarakat sebagai kelompok yang menyaksikan berita di media dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang politik. “Ya kita pun ingin agar media dapat menjadi sarana untuk pendidikan politik, jangan hanya bercerita tentang calon-calon yang buruk. Calon-calon yang baik perlu untuk diekspose media,” ujarnya.

Mengenai peran media ini, ia pun menjabarkan pentingnya untuk diatur lebih ketat. “Ya akan ada aturan spesifik. Kita akan coba, tapi kalau tidak akan diatur dalam peraturan KPU (PKPU). Aturan itu lebih banyak di KPU,” tutup Muzammil. ■

foto: Jayadit/ht

# Komisi VI DPR RI Tinjau Sejumlah PG di Jatim

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI meninjau Pabrik Gula (PG) Watoetoelis dan PG Toelangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/01). Ketua Tim Kunspek, sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, kedatangan Komisi VI tersebut bertujuan untuk mengkaji ulang kebijakan Pemerintah terkait penutupan PG yang berada di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X itu.

“Setelah adanya rencana penutupan tersebut, keresahan dari masyarakat mulai bermunculan. Tentu kita sebagai wakil rakyat tidak bisa diam, kita harus kaji betul apakah ini kebijakan yang tepat, benar, dan akan mencapai swasembada gula yang berdampak pada kesejahteraan petani serta terjangkanya harga gula, atau malah sebaliknya,” ungkap Hekal.

Politisi F-Gerindra itu berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang secara matang oleh Pemerintah, dengan melihat berbagai aspek seperti, kepentingan nasional terhadap gula, kesejahteraan para petani, hingga persediaan bahan baku dan lahan.

"Kita mau tahu apakah ini merupakan kebijakan yang tepat.

Kalaupun tepat apakah tepat dilaksanakan hari ini atau masih bisa tepat tahun depan. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatifnya, sehingga target swasembada pangan untuk kesejahteraan petani dan harga gula yang terjangkau itu bisa tercapai," ujar Hekal.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan pihaknya ingin memastikan kondisi pabrik secara real dengan harapan bahan baku yang diperlukan tersedia sehingga nantinya masih memungkinkan untuk direvitalisasi.

"Maka dari itu Komisi VI DPR RI ingin meminta kejelasan serta mengumpulkan data-data yang masih diperlukan untuk secepatnya dilakukan pembahasan, sehingga dapat menentukan dukungan politik ataupun tindakan selanjutnya terkait rencana ini dan menemukan hasil terbaik untuk semua pihak," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah tetap akan melanjutkan rencana penutupan sembilan PG di Jawa Timur. Penutupan tersebut didasarkan umur pabrik yang sudah ratusan tahun serta kurangnya produksi bahan baku di masing-masing PG.

Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VI DPR RI Juliari F Batubara dan Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Idris Laena dan Gde Sumarjaya Linggih (F-PG), Bambang Haryo (F-Gerindra), Nasril Bahar (F-PAN), Martri Agung (F-PKS), dan Zulfan Lindan (F-Nasdem). ■



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mengunjungi Pabrik Gula Watoetolis Sidoarjo di Jawa Timur

# Pansus Penyelenggaraan Pemilu Serap Masukan dari Media Nasional

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu mengunjungi sejumlah media massa elektronik maupun cetak. Hal ini dimaksudkan untuk menyerap masukan terkait pasal-pasal yang mengatur peran serta media massa dalam penyelenggaraan pemilihan umum.



Tim Pansus RUU Pemilu mengunjungi Trans Media di Jakarta

“ Pansus melakukan konsultasi ke media terkait klausul-klausul yang menyangkut dunia kampanye. Selain itu, media punya jejaring yang begitu luas sehingga bisa menyerap aspirasi dari berbagai elemen,” ujar Anggota Pansus Sirmadji usai mengunjungi Kompas Group dan Trans Media Group, Jakarta, Senin, (23/01).

Sirmadji mengatakan, dalam kunjungan itu, Pansus mendapatkan berbagai macam tanggapan yang cukup menarik. Salah satunya adalah usulan agar pengaturan terkait konten penyiaran kampanye tidak diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dikhawatirkan akan berbenturan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik maupun UU Pers.

Politisi F-PDI Perjuangan itu juga menekankan agar media perlu menempatkan posisinya sebagai media yang netral dan

tidak berpihak pada salah satu peserta atau partai politik tertentu dalam pemilihan umum, tidak hanya saat periode kampanye tetapi juga di luar masa kampanye.

“Hal ini memang belum diatur dalam UU, padahal di luar masa kampanye berdasarkan amatan masyarakat media sendiri sudah menunjukkan intensi ke arah kampanye. Nah, yang seperti ini termasuk yang akan dibahas di Pansus,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Pansus Rambe Kamarul Zaman menilai perlu ada pengaturan dan tanggung jawab khusus terkait peran media massa, yang teknisnya akan dirumuskan dalam Pansus. Mengingat, tidak sedikit media yang dimiliki oleh petinggi-petinggi partai politik sehingga masyarakat perlu disajikan dengan berita yang berimbang dan proporsional.

“Kalau sekarang setiap perusahaan

punya tanggung jawab *corporate social responsibility*, seharusnya media juga punya tanggung jawab menyangkut pemilu dengan menyertakan hak dan kewajibannya,” tegas politisi F-Golkar itu.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari mengatakan perlu ada regulasi yang mengatur dengan jelas tentang kampanye. Selain itu, lanjutnya, belajar dari pemilu 2014 lalu, beberapa calon melakukan kampanye secara tidak langsung melalui sinetron atau FTV. Namun, tidak bisa ditindak karena memang tidak memenuhi semua unsur pengertian kampanye dalam UU.

“Di luar masa kampanye tidak diatur, UU tidak bisa masuk. Jika aturan ini hanya mengatur masa kampanye saja, saya yakin ini akan tetap dimainkan oleh orang-orang yang sangat nafsu tinggi untuk menjadi pemimpin negeri ini dengan memanfaatkan ketidakjelasan itu,” ujar Titin. ■

(amy)Foto: Ruan/VR





Pimpinan DPR RI saat Sidang Paripurna DPR RI

## **Dewan Tetapkan Revisi UU ASN Sebagai Usul Inisiatif DPR RI**

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.



“ Apakah semua fraksi dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01).

Seluruh anggota DPR yang hadir serempak menyatakan "Setuju". Fahri pun mengetok palu tiga kali : Tok...Tok...Tok.

Penetapan Revisi UU ASN ini sebelumnya mendapat interupsi dari beberapa anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Anggota DPR RI Akbar Faisal (F-Nasdem) mengaku banyak mendapat pertanyaan dari daerah mengenai tenaga honorer kategori dua (K2). Ia menyatakan persetujuannya jika tenaga honorer K2 ini diangkat menjadi pegawai. Pasalnya banyak kepada daerah yang bohong kepada mereka untuk dijanjikan atau direkrut.

"Negara harus bertanggungjawab kepada mereka atas kebijakan akan mengangkat tenaga honorer K2 ini, walau resiko dalam pembayaran gaji sebesar Rp 23 triliun per tahun itu tidak mudah. Apalagi Menteri Keuangan telah melakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi beban berat. Kita peduli pada mereka", paparnya.

Oleh karena itu, menurutnya harus ada penjelasan dari pemerintah dari mana uang gaji mereka biar tidak menjadi persoalan.

Anggota DPR RI Elviana (F-PPP) senada dengan Akbar bahwa ia mendapatkan banyak pertanyaan dari daerah pemilihannya yaitu Jambi. Ia menyatakan pada hari ini seluruh tenaga honorer menaruh harapan besar kepada DPR yang mau merevisi UU ASN.

"Namun jika tidak semua tenaga honorer diangkat, kami mohon perhatian khusus pada honorer tenaga kesehatan. Tenaga Bidan dan Perawat," tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa tenaga kesehatan ini telah menempuh pendidikan dengan biaya yang besar. "Bayangkan untuk akreditasi program-program studi non kesehatan itu ditanggung oleh negara. Sementara program studi kebidanan, kesehatan, akreditasinya dibebankan

**"Negara harus bertanggungjawab kepada mereka atas kebijakan akan mengangkat tenaga honorer K2 ini, walau resiko dalam pembayaran gaji sebesar Rp23 triliun per tahun itu tidak mudah."**



<https://pendoasian.wordpress.com>

kepada mahasiswa, setelah mereka tamat hanya mendapat honor Rp400.000,- bahwa Rp200.000,-, bahkan kadang-kadang tidak ada," ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, negara harus bersiap akan adanya krisis tenaga kesehatan. Kemudian, masyarakat akan malas menitipkan anak-anaknya untuk sekolah bidan dan perawat. Sementara data nasional, kita kekurangan tenaga perawat.

Oleh sebab itu, tambah anggota DPR dari daerah pemilihan Jambi ini, di samping kita hari ini memikirkan nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, melalui pimpinan kepada menteri terkait, Bappenas untuk merencanakan dan merancang perlakuan yang khusus pada tenaga kesehatan ini. ■

(es)Foto: Krisnohtr

# Dewan Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Sisbuk dan RUU Kebudayaan

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dan Rancangan Undang-undang tentang Kebudayaan selama satu kali masa sidang.

“ Perpanjangan pembahasan RUU Sistem Perbukuan dan RUU Kebudayaan, sesuai dengan permintaan tertulis Pimpinan Komisi X DPR RI. Maka terhadap permintaan perpanjangan tersebut, apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan dapat kita setujui?” tanya Fahri kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01).

Jawaban "setuju" pun terdengar. Palu persetujuan pun langsung diketok oleh Fahri. Sebelumnya, permintaan perpanjangan pembahasan RUU ini sudah dilaporkan Pimpinan Komisi X DPR RI kepada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada 18 Januari 2017.

Ditemui di tempat yang berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengaku, ada beberapa hal dalam kedua RUU yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Namun untuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU

Sisbuk, sudah hampir selesai.

"Soal RUU Sisbuk, hampir tidak ada masalah. Kenapa kemudian pembahasan menjadi molor, ini karena ada satu masalah, yakni terkait kelembagaan. Siapakah yang diserahi untuk mengawasi, kemudian menjadi tempat untuk pengaduan, menyampaikan aspirasi dan sebagainya tentang perbukuan," jelas Fikri.

Politisi F-PKS itu menambahkan, bentuk dari badan atau dewan itu masih belum menemui kesepakatan. Ia menekankan, badan atau dewan itu nantinya tidak bisa seutuhnya independen, namun tidak bisa juga adanya keterlibatan pemerintah.

"Ini tinggal dari Pemerintah, bentuknya seperti apa. Kalau itu sudah selesai, berarti selesai. Badan atau Dewan itu tidak bisa independen sepenuhnya, melibatkan pemerintah juga tidak bisa," imbuhnya.

Sementara untuk RUU tentang Kebudayaan, Fikri mengakui bahwa RUU ini sudah melewati pembahasan yang cukup lama. Adanya unsur-unsur fundamental yang mengalami



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih

perubahan, menjadikan pembahasan cukup alot.

"Di beberapa hal dalam RUU, berdasar usulan praktisi kebudayaan, UU ini tidak mengatur detail. Sementara pemerintah cenderungnya mengatur tentang pengelolaan. Wajar jika cara berpikir pemerintah, karena ini menjadi payung untuk mereka bekerja," jelas Fikri.

Namun, lanjut politisi asal dapil Jateng itu, pembahasan RUU Kebudayaan sudah menemui titik temu. Penormaan antara Panja dengan Pemerintah sudah ketemu. "RUU kebudayaan lebih luas. Sehingga nanti bagaimana penormannya, akan dibahas di Panja. Namun saya optimis, kedua RUU ini selesai dalam masa sidang ini," harap Fikri.

Untuk diketahui, Panja RUU Sisbuk diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (F-Gerindra). Sementara RUU Kebudayaan, dikomando oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (F-PG). ■



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi' Munawar

## DPR RI Dorong Pembentukan Kaukus Palestina di seluruh Negara PUIC

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam Konferensi PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States/Parlemen Negara-negara OKI) ke 12 dari tanggal 21 - 28 Januari di Bamako, Mali menyerukan agar parlemen-parlemen negara Muslim segera membentuk sebuah kaukus atau komisi khusus soal isu Palestina.

“ Saya memandang pembentukan kaukus atau sejenisnya akan sangat bermanfaat untuk mensosialisasikan isu Palestina ke masyarakat luas. Parlemen Indonesia sudah lama memiliki Kaukus Palestina. Kendati dasar dan kecenderungan politik di parlemen kami beragam, namun bagi kami masalah Palestina merupakan keprihatinan bersama, dan itu sudah menjadi sikap negara”, kata Rofi' di Bamako, Mali, (23/01).

Dalam sesi sidang Komisi

Palestina ke-7, delegasi Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menekankan urgensi realisasi persatuan semua elemen dan faksi-faksi pejuang Palestina. "Kami meyakini bahwa

persatuan merupakan senjata paling ampuh untuk menghadapi agresi Zionist Israel," tegas Rofi Munawar, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Mengambil inisiatif sebagai delegasi pertama yang memberikan pandangan terkait isu Palestina, Rofi' juga menyambut baik atas disahkannya Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2334 yang mendesak Israel segera menghentikan semua aktifitas pembangunan ilegal permukimannya di atas tanah Palestina.

Terkait resolusi tersebut, Rofi mengingatkan ihwal implementasinya. "Kita semua harus mendesak untuk segera di laksanakan resolusi itu tersebut. Kami juga melihat lolosnya resolusi itu membuktikan semakin kuatnya kesadaran masyarakat internasional atas berbagai pelanggaran Israel," papar Rofi.

Pada bagian lain, anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur VII tersebut menyambut baik keinginan Palestina untuk menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh.

"Indonesia menyerukan parlemen negara-negara muslim untuk mendukung keinginan Palestina menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan penuh Palestina dengan cara membantu mendapatkan pengakuan lebih banyak lagi dari negara-negara di dunia," tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Delegasi Indonesia yang fasih berbahasa Arab tersebut mengingatkan juga ihwal bahaya dari rencana Donald Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerusalem). "Jelas rencana itu sangat berbahaya bagi perdamaian. Parlemen akan mendorong elemen-elemen pemerintahan dan lembaga-lembaga politik dan kemanusiaan internasional lainnya untuk mendesak Amerika Serikat agar membatalkan rencana provokatif tersebut," pungkas Rofi'. ■

(Inf)Foto: Dok.BKSAP/HR

# Pemerintah Harus Cerdas Pertimbangkan Penutupan Aset Bernilai Bisnis

Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mengunjungi pabrik gula (PG) Gondang Baru, Klaten Jawa Tengah, terkait dengan rencana pemerintah untuk menutup sejumlah pabrik gula yang merupakan aset BUMN. PG Gondang Baru merupakan salah satu pabrik gula perusahaan plat merah yang menjadi sasaran untuk ditutup. Pada saat digelar rapat dengan Kementerian BUMN ataupun PTPN IX, Dewan di Komisi VI DPR RI tidak diberikan pilihan atau solusi lain selain bentuk penutupan usaha.



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mengunjungi Pabrik Gula Gondang Baru

“ Pemerintah harus cerdas dalam mempertimbangkan aset yang mempunyai nilai bisnis. Akan digunakan sebagai apa lahan dan bangunan bekas pabrik gula kalau harus ditutup, kalau masalahnya sudah tidak ekonomis lagi pabrik gula tersebut, harus dicari inefisiensinya

karena faktor apa?,” ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir di Klaten Jawa Tengah, Jum'at (20/01).

Menurutnya, rencana penutupan PG Gondang Baru harus memiliki *roadmap* atau *planning* yang jelas, akan dipergunakan untuk apa, jangan sampai menjadi aset yang *nganggur*,

mubazir dan terbuang sia-sia. Harus ada rencana yang tepat, jangan sampai petani kehilangan mata pencahariannya.

"Tidak mudah untuk menutup pabrik gula Gondang Baru, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh



pemerintah sebelum melakukan penutupan. Banyak persoalan sosial yang nantinya akan timbul akibat penutupan pabrik gula itu, salah satunya adalah karyawan yang akan kehilangan pekerjaan dan petani juga kehilangan penghasilan," tandas Legislator F-Hanura itu.

Inas menyampaikan, awalnya ia mendapat informasi bahwa ada luas lahan sekitar 1000 hektar, tetapi setelah dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, ternyata yang efektif hanya 600 hektar, sedangkan yang 400 hektar petaninya sudah beralih tanaman.

"Hal yang perlu kita sikapi adalah kenapa petani tersebut harus beralih tanaman, berarti ada persoalan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Komisi VI DPR RI, tetapi Komisi IV DPR RI juga harus ikut menyelesaikan persoalan ini. Kita minta kepada PTPN untuk berbicara juga kepada Komisi IV DPR RI tentang persoalan-persoalan yang ada, dan juga mengenai keinginan masyarakat yang tidak ingin pabrik gula tersebut ditutup," jelasnya.

Akhirnya semua dapat diketahui setelah Komisi VI DPR RI berkunjung langsung ke lokasi PG Gondang Baru di Klaten. Dirut PTPN IX sendiri telah menyatakan, kalau memang ditugaskan untuk tetap jalan mereka masih bisa. Begitu juga dengan persoalan lahan, yang katanya hanya ada 1000 hektar maksimal, ternyata terbukti dari pihak Pemda mengatakan masih ada lahan bengkok seluas 7500 hektar.

"Hanya saja tidak ada komunikasi antara PTPN dengan Pemda setempat. Komunikasi ini harus segera dibangun, saya melihat PTPN ini sudah patah semangat, dan berakibat masyarakat yang akan dirugikan," pungkasnya. ■

(Foto: Piyanti)

## Menlu Didesak Klarifikasi Dugaan Penyelundupan Senjata oleh Pasukan Indonesia di Daffur

Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung mendesak Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi untuk mengklarifikasikan kasus dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan perdamaian PBB (UNAMID) asal Indonesia.

“Saya yakin tidak ada TNI, yang merupakan pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang menyelundupkan senjata ke Daffur, Sudan. Itu juga sudah diklarifikasi oleh TNI. Dan saya yakin polisi Indonesia juga demikian, Kita bukan bangsa penyelundup,” ujar Asril.

Oleh karena itu pihaknya akan menempuh jalur diplomasi. Dengan mempertanyakan dan mendesak Menteri Luar Negeri untuk mengklarifikasikan hal tersebut.

Ditambahkannya, ia mengakui bahwa saat ini senjata buatan Indonesia (diproduksi oleh PT Pindad -red) dapat dikatakan cukup unggul dibanding buatan-buatan negara lain. Sehingga tidak sedikit negara yang menginginkan senjata tersebut.

Namun Indonesia sendiri, lanjutnya, telah cukup lama mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID). Sejauh ini pasukan Indonesia cukup dikagumi dan disegani oleh pasukan lain. Sehingga kecil kemungkinan melakukan tindakan tercela itu. Selain itu Asril juga meyakini bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa penyelundup. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Sebagaimana berita yang dilansir dari media lokal Sudan



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung

*Tribune*, Deputy Gubernur Darfur Utara, Mohamed Hasab al-Nabi mengakui, aparatnya menangkap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) karena diduga telah melakukan penyelundupan senjata.

Indonesia sendiri mengirim pasukan perdamaiannya yang terdiri dari TNI dan Polri yang tergabung dalam UNAMID. Pasukan TNI berasal dari Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-B. Sedangkan Polri mengirim ratusan anggotanya yang tergabung dalam Satgas *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia VIII Garuda. ■

(Foto: Anis/Pr)

# Komisi V DPR RI Tekankan Lima Hal Pasca Banjir Bandang Bima, NTB



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi pasca banjir bandang di Bima, NTB

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dimaksudkan dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi pasca banjir bandang yang terjadi pada 21 dan 23 Desember 2016 lalu.

**M**enurut Ketua Komisi V DPR yang sekaligus memimpin Tim Kunspek Fary Djemi Francis, kehadiran Tim Komisi V DPR RI, Rabu (18/01) adalah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat, serta memastikan langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan oleh Kementerian PU-PR, Kemenhub, BMKG dan Basarnas.

Fary menegaskan ada 5 hal yang ditekankan oleh Komisi V DPR RI guna menangani akibat banjir bandang di NTB. Pertama, memastikan terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya jembatan Podo dan jembatan Padolo.

Kedua, lanjut politisi Gerindra ini, memastikan kebersihan lingkungan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, ketiga, memastikan keberadaan air bersih bagi masyarakat.

Diharapkan pada bulan Juli mendatang, PDAM Kota Bima bisa beroperasi kembali normal.

Pimpinan Komisi V DPR RI ini melanjutkan, langkah keempat, memastikan aliran listrik di Kota Bima

Dan kelima, memastikan BMKG untuk terus memberikan informasi cuaca ke masyarakat guna menghindari korban jiwa akibat bencana.

“Kepada jajaran Kemen PU-PR, Kemenhub dan BMKG serta Basarnas perlu menyiapkan dana khusus, diluar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017, untuk penanganan bencana banjir, baik untuk korban banjir bandang Bima dan di daerah lain di Indonesia,” kata Fary.

Berdasarkan informasi dari BMKG yang diperoleh Tim Komisi V DPR RI, hujan pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 lalu

merupakan hujan yang skalanya 100 tahun sekali. Hingga kini masyarakat masih merasa trauma terhadap banjir yang telah dan akan terjadi. Kini, Kemen PU-PR sedang melakukan normalisasi sungai Paruga yang akan dipasang beronjong. Dan dalam perencanaannya, warga di sekitar lokasi sungai akan di relokasi dan akan dibangun jalan inspeksi selebar 3 meter.

Karena itu, Komisi V DPR RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan inspeksi di pinggir bantaran sungai Paruga. Selain itu perlu tambahan dana terkait kendala proses pembersihan lingkungan warga terkena dampak banjir, karena banyak lorong kecil dan sempit. Juga perlu perbaikan selokan, karena dipenuhi lumpur akibat banjir bandang yang cukup besar. ■



# Pelabuhan Teluk Nibung Dijadikan Pintu Masuk Turis Malaysia

Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara akan dijadikan pintu masuk turis dari Malaysia yang akan wisata ke Danau Toba.

“Potensi yang begitu besar di Teluk Nibung dimana kita lihat perahu-perahu nelayan yang begitu besar, kemudian jarak antara Teluk Nibung dengan Malaysia relatif sangat dekat”, kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said saat meninjau pelabuhan Teluk Nibung bersama Tim Komisi V DPR RI di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Kamis (19/01)

Dijelaskan Muhidin, saat ini Pelindo I sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mengembangkan pelabuhan Teluk Nibung. Pelabuhan ini, lanjut politisi Partai Golkar ini, nanti akan menjadi salah satu pelabuhan

pariwisata yang menerima arus pariwisata dan penumpang yang datangnya dari Malaysia.

Untuk menunjang itu semua, tegasnya, tentunya dibutuhkan sarana-sarana yang mendukung termasuk fasilitas lain pelabuhan dan tempat pariwisata. “Sebagaimana informasi dari Walikota Tanjungbalai, ada Pulau Besusen yang akan dikembangkan menjadi pusat rekreasi yang mendukung seluruh potensi wisata yang berada di Sumatera Utara,” paparnya.

Ia berharap, pada saatnya nanti jangan sampai ada hambatan-hambatan yang bisa mengganggu pariwisata yang ada di

Tanjungbalai khususnya yang akan masuk ke Danau Toba.

Sementara itu, Walikota Tanjungbalai M. Syahrial bersyukur atas kunjungan Komisi V DPR RI ke Tanjungbalai. Ia mengharapkan, apa yang telah dilihat dan direspon Komisi V DPR RI dapat terlaksana.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak adalah infrastruktur yaitu pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan pelabuhan dan melewati Kota Tanjungbalai, termasuk pembangunan Pelabuhan yang akan bekerjasama dengan PT. Pelindo I. ■

foto: Suahri



Tim Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Teluk Nibung di Tanjungbalai, Sumut

# Media Sosial Perlu Diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu



Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy

“Kunjungan ini merupakan program Pansus untuk mencari dan menyerap aspirasi dari teman-teman media, karena ada 45 pasal dalam RUU Pemilu ini yang berisi tentang hubungan antara media dan pemilu,” ungkap Lukman usai melakukan media visit ke MNC Group di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/01).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lukman, membahas beberapa hal yang menjadi catatan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah perlu diaturnya media sosial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, sebab pengaruh media sosial terhadap masyarakat lebih tinggi dibanding media lain.

"Media sosial ini perlu diatur, karena dikhawatirkan akan memberikan informasi yang tidak kredibel atau mengarah pada berita *hoax*, maka dari itu hal ini akan menjadi perhatian kami semua," katanya.

Politisi F-PKB itu juga menyampaikan pihaknya keberatan apabila ada keterbatasan waktu dalam menyampaikan informasi tentang calon peserta pemilu, sebab mereka menilai akan mengurangi pengetahuan publik tentang calon peserta pemilu itu. Padahal hal tersebut berkaitan erat dengan peningkatan partisipan masyarakat dalam memilih nantinya.

"Kalau ada pembatasan yang sangat signifikan pada media, dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan dan mengiklankan pemilu 2019 dikhawatirkan tidak

Panitia Khusus (Pansus RUU) Penyelenggaraan Pemilu melakukan media visit ke beberapa media guna mendapat masukan terkait peran media dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Ketua Pansus Lukman Edy menjelaskan di dalam draf RUU terdapat 45 pasal yang mengatur tentang peran media.

berkeadilan dalam meningkatkan partisipasi publik. Karena banyaknya informasi hubungannya erat dalam meningkatnya partisipan publik, makanya harus dibuka ruang lebih luas dalam menyampaikan informasi," jelasnya.

Lukman menjelaskan semangat RUU Penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang media sebenarnya mengarah pada informasi yang berkeadilan. "Oleh karena itu, semua aspirasi yang diterima dari media nasional ini untuk dicarikan solusinya agar peran media maksimal dalam meningkatkan partisipan publik," tutup politisi asal dapil Riau itu.

Ditempat yang sama, CEO PT Media Nusantara Citra Tbk David Fernando Audy mengatakan, pengaturan jangan hanya pada media televisi, radio dan koran, namun juga

perlu dipertimbangkan untuk pengaturan pada media sosial (medsos).

"Karena percuma televisi diatur tapi tidak mengatur medsos. Karena saat ini banyak berita muncul di medsos, dan kita tahu banyak berita *hoax* yang dilancarkan oleh medsos yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Bahaya kalau masyarakat salah menilai karena mendapat berita yang tidak diatur," ungkapnya.

Pihaknya juga keberatan dengan adanya pembatasan waktu terhadap media. Karena hal itu dinilai membuat masyarakat tidak bisa mengakses calon peserta pemilu secara maksimal dan akan merugikan masyarakat. "Dengan perkembangan informasi yang tinggi membuat hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar tidak tercapai, kalau ada pembatasan," pungkasnya. ■

fmj/foto: Nuarhug/oz

## Komisi VI DPR RI Akan Lakukan Kajian Soal Penutupan Pabrik Gula di Situbondo

Komisi VI DPR RI pada Jumat, (20/01) melakukan kunjungan kerja ke Situbondo, Jawa Timur untuk menindaklanjuti rencana pemerintah yang berencana akan menutup tiga pabrik gula (PG) yang dinilai tidak efisien dalam operasionalnya karena masih menggunakan teknologi lama. Beberapa PG di Situbondo yang akan ditutup yakni ke PG Olean, PG Panji, dan PG Wringinanom.

“Kami sebagai wakil rakyat di DPR RI sengaja melakukan kunjungan kerja ke PG Olean, PG Panji, dan PG Wringinanom yang rencananya akan ditutup

untuk melihat kondisi pabrik gula secara langsung serta ingin mendapatkan informasi dan masukan dari petani maupun pihak PTPN XI,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman

# Demi Mendukung Agenda DPR RI Dibutuhkan Setjen Kokoh dan BKD Kuat

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR RI Achmad Djuned menyampaikan, peresmian nama baru Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan (BKD) RI merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan. Pernyataan tersebut dia sampaikan di Komplek Parlemen, saat memberikan sambutan sebelum nama baru gedung diresmikan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, di Jakarta, Selasa (24/01).

Selain itu dia juga menegaskan saat ini demi mendukung agenda Anggota DPR RI, dibutuhkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang kokoh dan BKD RI yang kuat.

"Kita perlu Sekretariat Jenderal yang kokoh, kita perlu Badan Keahlian yang kuat, sinergitas kedua itu nantinya akan menjadi penopang kegiatan DPR RI. Karena pada esensinya kegiatan kita sama, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mendukung DPR RI secara optimal dan efektif," papar Djuned.

Dia juga menyampaikan, Setjen DPR RI

dan BKD RI mempunyai makna dan tujuan tertentu, oleh karena itu dengan semangat kebersamaan, kedua lembaga pendukung Anggota DPR RI ini akan selalu menjaga sinergitas. Dia juga mengungkapkan, ego sektoral menghambat *support* kepada dewan.

"Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian akan menjadi sinergitas yang kokoh dalam rangka mendukung kinerja DPR RI," ungkap Djuned.

Pada kesempatan ini, dia juga menyampaikan, Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi Madya DPR RI sedang berproses, mudah-mudahan Sekretaris Jenderal yang



Pelaksana Tugas Sekjen DPR RI, Achmad Djuned

baru akan segera terpilih, dan bisa membuat agenda-agenda untuk menunjang pencitraan dewan kedepan.

"Dan saya yakin bahwa kerja sama Sekretaris Jenderal yang baru dan Badan Keahlian nanti akan bisa mendukung kegiatan-kegiatan dewan," harap Djuned.

Mengakhiri sambutan, dia mengajak seluruh jajaran pegawai Setjen DPR RI untuk bersama-sama secara cepat mewujudkan berbagai program dalam rangka merealisasikan agenda perubahan kelembagaan DPR RI, Setjen maupun BKD RI. ■

(foto)Foto : Anze/tnr



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana

Natawijana kepada Parleментарia di sela-sela kunjungan kerjanya.

Ia mengatakan bahwa rencana penutupan tiga dari empat pabrik gula di Kota Santri

Situbondo ini bukan semata-mata karena ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat Situbondo khususnya kepada petani tebu akan tetapi justru ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah berencana merevitalisasi pabrik gula yang tidak efisien jadi lebih efisien karena ketiga PG di Situbondo masih menggunakan teknologi lama (sejak zaman kolonial Belanda) dan tertinggal jauh bila dibandingkan dengan pabrik gula milik swasta.

Politisi Demokrat ini menjelaskan kepada petani tebu agar tidak resah dengan rencana penutupan tiga pabrik gula tersebut. Karena hal itu masih pada tahap wacana. Komisi VI bersama pemerintah pun masih akan melakukan kajian ekonomi yang lebih mendalam terkait rencana tersebut.

"Saya berharap petani tebu disini jangan resah karena penutupan tiga PG masih

rencana, dan kami bersama pemerintah masih akan melakukan kajian ekonomi yang lebih dalam terkait rencana penutupan sejumlah pabrik gula di Jawa Timur," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara XI, Mochammad Cholidi mengatakan rencana penutupan tiga PG di Situbondo agar tidak dilihat dari sisi negatif karena rencana penutupan PG tidak lain untuk efisiensi. "Dengan tetap menggunakan mesin uap konversi rendah tentunya dalam operasional ketiga PG di Situbondo akan mengalami inefisiensi," ujarnya.

Ia menuturkan, penataan kembali pabrik gula setidaknya harus dilihat dari peremajaannya agar stigma pabrik gula milik BUMN yang tidak bisa bersaing dengan pabrik gula milik swasta hilang. ■

(foto)Foto : Hindra/hr

# Lembaga Survey Harus Diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI Yandri Susanto menegaskan harus ada pasal yang mengatur keberadaan lembaga survey dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, transparansi lembaga survey sangat penting saat mengumumkan penghitungan cepat hasil pemungutan suara.

“ Yang paling penting bagi kita transparansi harus dijunjung, misalkan kalau dia berafiliasi kepada salah satu calon tertentu, maka itu harus di declare, termasuk pembiayaan,” ungkap Yandri dalam RDPU Pansus dengan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu, (25/01).

Selain mengumumkan sumber pendanaan, lanjut Yandri, lembaga survey juga dituntut untuk menginformasikan kepada masyarakat metodologi yang mereka digunakan saat melakukan penghitungan cepat. “Sehingga kalau itu dilakukan maka tidak akan ada lembaga survey yang abal-abal atau pesanan sponsor atau menohok calon lain,” imbuh politisi dari F-PAN itu.

“Misalkan angka-angka yang dipakai selama ini kita anggap ilmiah, hal itu karena tidak transparan dan ditunggangi oleh kepentingan politik pasangan calon

atau parpol tertentu. Akibatnya bisa membawa kekacauan pada suasana pemilu legislatif dan presiden serentak nanti,” lanjutnya.

Kekacauan itu, masih kata Yandri, dalam artian tahapannya bisa terganggu dan membuka peluang untuk digugat. Termasuk, bisa menimbulkan konflik horizontal antar pendukung calon peserta karena penggiringan opini yang dilakukan oleh lembaga survey.

“Selama ini, bisa berbeda antara lembaga survey satu dengan yang lainnya, padahal dengan daerah yang sama, rentan waktu yang sama, pasangan calon yang sama, tapi kok hasilnya jomplang. Nah, untuk menghindari itu semua dan menjamin pemilu berlangsung jujur dan adil, lembaga survey harus tertib,” tandas politisi dari dapil Banten II itu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pengaturan tentang lembaga survey secara teknis akan diatur dalam Peraturan

KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan lembaga quick count yang berpartisipasi dalam Pemilu harus teregistrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil perhitungannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Pengalaman di Pemilu 2014, banyak praktisi-praktisi yang atas nama lembaga *quick count* tapi sebetulnya adalah joki politik dan itu membuat gaduhkan pers kita karena beda afiliasi, ketika kutip datanya tidak *match*,” kata Yosep.

“Lembaga survey harus diperjelas, misalnya lembaga X pelakunya orang ini tetapi juga merangkap juga tim sukses, tim pemenang pemilu. Jelas survey itu dilakukan dalam rangka apa, kalau orang yang dia dukung menjadi calon itu pasti angkanya tinggi, jadi memang harus di *declare*” imbuhnya. ■

Ismi/Foto: Asosiasi



Pimpinan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI Yandri Susanto dan Lukman Edy



Tim Kunspek BURT DPR RI mengunjungi RSIA Siti Khadijah di Gorontalo

## BURT DPR RI Harap Kesigapan Jasindo

Salah satu rumah sakit *provider* Jasindo yang merupakan mitra kerja sekaligus institusi penjaminan kesehatan bagi 560 Anggota DPR RI dan keluarganya mendapat tinjauan langsung dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Dipimpin oleh Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso, Tim kunker BURT DPR RI memberi masukan Jasindo agar lebih memberikan perhatian pada faktor pendukung pelayanan selain kamar dan fasilitas di dalam rumah sakit.

“Tentunya kita ingin mendapatkan pelayanan prima, tetapi kalau di daerah itu tidak mempunyai peralatan yang cukup maka bisa melanjutkan perawatan itu di kota lain. Pada situasi darurat seharusnya kita bisa meminta kepada Jasindo untuk memberikan fasilitas untuk mengantar pasien dibawa ke Jakarta atau daerah lain,” tandas Agung.

Hal itu diutarakannya di sela-sela kunjungan Tim BURT melihat kesiapan dan pelayanan kesehatan bagi anggota

DPR RI dan keluarga di RSIA Sitti Khadijah, Gorontalo, Kamis (19/01).

Dijelaskan Direktur RSIA Sitti Khadijah Dr. Elson Djakaria, SPog, pihaknya memang sedang mengadakan pembangunan fisik rumah sakit dan berbagai penambahan fasilitas. Diharapkan dengan pembenahan itu maka anak dan isteri atau suami anggota dewan yang berasal dari Dapil Gorontalo maupun anggota dewan yang sedang kunjungan kerja di daerah tersebut bila memerlukan

pelayanan kesehatan dapat dicover oleh asuransi Jasindo.

“Jadi yang kita perhatikan itu selain fasilitas rumah sakitnya kesiapan atau kesigapan Jasindo memberikan pelayanan kepada anggota dewan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dari hasil kunjungan langsung tim kunker mengharapkan agar RSIA dapat menambah kendaraan operasional cepat Ambulance yang mendukung RSIA Sitti Khadijah untuk lebih maju mengembangkan pelayanannya. ■

icdai/foto: Rizka/ht



**Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Fary Djemi Francis tinjau rumah penduduk pasca banjir bandang di Bima. Kamis, (19/01) Foto: Eka/hr (Kanan)**



**Tim Kunspek Komisi V dipimpin oleh Wakil Ketua Yudi Widiana Adia meninjau Bendungan dan Waduk Seumayan Pidie, NAD (19/01) Foto: Sofyan/hr (Kiri)**

**Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Inas Nasrullah Zubir tinjau Pabrik Gula (PG) Gondang Baru, Klaten, Jateng Jum'at, (20/01) Foto: Devi/hr (Kiri)**



**Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Mohamad Hekal tinjau Pabrik Gula (PG) Watoetoelis di Sidoarjo, Jateng. Jum'at, (20/01) Foto: Tiara/hr (Kanan)**



**Tim Kunspek BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Agung Budi Santoso meninjau kamar VIP RSIA Sitti Khadijah, di Gorontalo (19/01) Foto : Rizka/hr (Kiri)**



**Tim Kunspek BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Hasrul Azwar meninjau Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, di Kalteng (19/01) Foto : Iwan/hr (Kanan)**